



# TABEL KRONIK PEMBAHASAN OMNIBUS LAW VS PEMBAHASAN VIRUS CORONA

## Tabel Kronik Pembahasan Omnibus Law VS Pembahasan Virus Corona

**Lokataru Foundation** hendak menunjukkan bagaimana perbandingan hiruk-pikuk ruang publik kita dalam membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan pandemi virus Corona selama rentang waktu Januari-Maret 2020. Perbandingan tabel ini dilakukan untuk melihat seberapa besar fokus Pemerintah terkait kedua isu ini.

Seiring dengan kian mengganasnya penyebaran COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) di Indonesia, tercatat hingga 6 April 2020 terdapat 2.491 orang terkonfirmasi positif dengan korban meninggal 209 orang. Hal ini semestinya kian mendesak Pemerintah untuk menitikberatkan segala upaya dan kebijakan untuk mengatasi pandemik ini. Pandemi ini adalah persoalan global, melumpuhkan aktivitas ekonomi, sekaligus membuat jutaan orang di seluruh dunia terancam keselamatannya. Namun sayangnya, ketika penyebaran virus ini sudah mencapai negara tetangga, pemerintah Indonesia justru bersikukuh untuk menutup beragam informasi mengenai wabah ini, serta tidak kunjung menerapkan standar kegentingan penanganan wabah. Dari data di bawah yang kami kompilasikan dari berbagai media, terlihat bagaimana pemerintah lebih sibuk mengupayakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap bisa sesegera mungkin disahkan.

Sedari awal pembahasan RUU sapu jagat ini, pemerintah konsisten menutup mata dan telinganya terhadap segala aspirasi, protes dari elemen buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini ditolak banyak pihak karena muatannya yang mengandung kecacatan dan kesalahan; naskah akademik yang lambat dirilis dan isinya 'kosong', tidak ada konsultasi ke masyarakat, hingga isi materi pasal demi pasalnya yang ditaburi 'salah ketik', berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan hidup serta membahayakan kesejahteraan buruh.

Namun, saat wabah Corona terus menelan korban jiwa, baru baru ini pemerintah dan DPR menunjukkan wajah aslinya dengan tetap ngotot meneruskan pembahasan RUU Omnibus Law. Tanpa menghiraukan anjuran *physical distancing*, DPR kembali memulai sidang pada 30 Maret lalu. Salah satu agendanya: mengesahkan Omnibus Law. Pemerintah dan DPR seolah memanfaatkan momen wabah ini untuk menyelundupkan RUU tersebut agar terus dibahas di legislatif. Lantaran wabah Corona, keleluasaan berkumpul dan mobilitas warga terhambat, sehingga otomatis partisipasi publik melemah. Disitulah RUU Omnibus menemukan celahnya. Ini adalah seburuk-buruknya praktik demokrasi Indonesia. Contoh utama dari legislasi tanpa kemanusiaan.

Sepatutnya, Pemerintah dan DPR memfokuskan diri dalam penanganan Wabah Corona. DPR seharusnya melaksanakan fungsi pemantauannya dan mengawasi dengan ketat kerja-kerja Pemerintah dalam penanganan Wabah. Bukan menjadi lembaga oportunistis yang memanfaatkan bencana untuk meloloskan RUU yang nyata-nyata cacat dari berbagai sisi.

Waktu	Pembahasan Omnibus Law	Pembahasan Virus Corona
	<b>JANUARI 2020</b>	
14 Januari 2020	Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan para petinggi partai politik koalisi untuk membahas kasus Omnibus Law di Istana Negara. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan RUU tersebut diharapkan akan disahkan oleh DPR pada 17 Agustus 2020.	
15 Januari 2020	Terhadap sejumlah organisasi, buruh, Presiden inginkan POLRI, BIN, Jaksa Agung, dan sejumlah Kementerian untuk melakukan pendekatan komunikasi terkait penolakan terhadap Omnibus Law.	
16 Januari 2020	Presiden minta pembahasan Omnibus Law rampung dalam 100 hari.	
18 Januari 2020	Pemerintah akan mengeluarkan Surat Presiden dan Draf Omnibus Law ke DPR.	
20 Januari 2020	Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan demo di depan DPR untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja	
22 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengirimkan draft Omnibus Law.</li> <li>• Koalisi Masyarakat Sipil menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang menabrak tahapan pembuatan peraturan perundangan-undangan.</li> </ul>	
24 Januari 2020	Menkopolkam Mahfud MD menilai buruh belum memahami isi Omnibus Law sehingga melakukan sejumlah aksi unjuk rasa di depan DPR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat tenang dan nyatakan sudah siaga satu.</li> <li>• Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah memulai mengantisipasi penyebaran virus Corona</li> <li>• Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Pemerintah sudah melakukan antisipasi virus Corona masuk ke Indonesia.</li> </ul>
27 Januari 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Terawan mengatakan sampai detik ini semua negatif virus Corona</li> <li>• Menteri Terawan berharap masyarakat tidak panik menanggapi penyebaran virus Corona, jangan resah, enjoy saja, makan yang cukup.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden mengatakan kita sudah waspada dan siaga terkait virus Corona</li> <li>• Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum melakukan penutupan semua penerbangan ke Cina selain dari dan ke Wuhan saja.</li> </ul>
29 Januari 2020	Puan Maharani (Ketua DPR ) dan Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) bertemu untuk samakan persepsi mengenai Omnibus Law	SK Kepala BNPB No.9.A/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (28 Januari - 28 Februari 2020).
<b>FEBRUARI 2020</b>		
2 Februari 2020	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengharapkan RUU Omnibus Law yang telah disusun Pemerintah dapat segera disahkan.	Kompleks militer di Hanggar Lanud Raden Sadjad, Natuna dijadikan sebagai lokasi observasi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Cina untuk waktu 14 hari (2 Februari - 16 Februari 2020).
3 Februari 2020		Menteri Terawan mengatakan bahwa dibandingkan virus Corona lebih berbahaya informasinya, terutama hoaks.
4 Februari 2020	Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta semua pihak untuk mendukung RUU Omnibus Law. Kebijakan ini dinilai sebagai kunci bagi Indonesia untuk terhindar dari krisis ekonomi.	SK Menteri Kesehatan No.HK.01.01/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi 2019-nCoV Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
10 Februari 2020		Kelakar dari Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi yang mengatakan bahwa Corona sudah pergi lalu dia menyebut virus Corona sebagai mobil, “Corona masuk Batam? Hah? Mobil Corona?” katanya sambil tersenyum.
11 Februari 2020		Menteri Terawan membantah hasil riset dari peneliti Harvard T.H Chan School of Public Health yang memprediksi virus Corona seharusnya sudah masuk ke Indonesia.
12 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPR terima draft Omnibus Law yang diserahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massa pekerja/buruh DIY melakukan demo di kantor DPRD DIY dengan tuntutan membatalkan Omnibus Law yang dianggap merugikan.</li> </ul>	
15 Februari 2020		Kelakar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, ya menyatakan bahwa karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus Corona tak bisa masuk. Tapi Omnibus Law tentang perizinan lapangan kerja jalan terus.
16 Februari 2020	Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengadakan demo besar-besaran di 24 Provinsi di Indonesia terkait Omnibus Law	
17 Februari 2020	Kantor Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) didatangi sekitar 19 orang yang melakukan demo, membakar ban serta meneriaki Nining Elitos (Ketua KASBI) sebagai provokator serta berteriak jargon yang dapat diidentifikasi bahwa mereka pendukung Omnibus Law.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam beberapa kesempatan, Menteri Terawan menyatakan berkat doa, Indonesia kebal dari virus Corona.</li> <li>• Kelakar Budi Karya Sumadi, Menhub, yang mengatakan bahwa virus (COVID-19) tidak masuk ke Indonesia karena tiap hari kita makan nasi kucing.</li> </ul>
18 Februari 2020	Pencatutan nama organisasi buruh ke dalam daftar tim pengkajian RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai sebagai cara otoriter Pemerintah untuk mendapatkan stempel buruh.	
20 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari rencana mogok buruh besar-besaran. Menurutnya itu hanya omongan saja, “Apa yang mau diributin? Semua baik”, tukasnya</li> <li>• LBH Jakarta mengatakan telah terjadi dua kali intimidasi kepada masyarakat yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.</li> <li>• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa akan lakukan <i>roadshow</i> dalam rangkai sosialisasi RUU Omnibus Law</li> </ul>	
23 Februari 2020	Survei Lokataru Foundation menyatakan dari 180 mahasiswa yang terdiri dari 77 kampus di 18 provinsi menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja dalam proses penyusunannya tidak melibatkan mahasiswa.	
25 Februari 2020	DPR tunda pembahasan Omnibus Law sampai usai masa reses.	
26 Februari 2020		Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan banyak kyai dan ulama yang selalu membaca doa qunut yang menjadi salah satu peran besar virus Corona minggir dari Indonesia.

27 Februari 2020	DPR pastikan pembahasan Omnibus Law dilakukan dengan cermat, dengan sosialisasi sehingga tidak ada kegaduhan yang kemudian membuat orang salah prasangka kepada Pemerintah dan DPR.	
28 Februari 2020	Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Pemerintah tidak akan mencabut draf Omnibus Law.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PM Australia Scott Morrison mempertanyakan laporan yang menyatakan sampai hari ini belum terjadi kasus pasien positif virus Corona di Indonesia.</li> <li>● Pemerintah mengeluarkan stimulus Ekonomi Jilid I sebesar Rp 298 Miliar untuk sektor pariwisata guna mengantisipasi dampak corona yang semakin meluas ke Indonesia. Bentuk kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bayar jasa <i>influencer</i> Rp 72 Miliar;</li> <li>- Promosi pariwisata (diskon tiket pesawat 45-50%) ke 10 destinasi wisata Rp 103 Miliar;</li> <li>- Kegiatan <i>tourism</i> Rp 25 Miliar.</li> </ul> </li> </ul>
29 Februari 2020		SK Kepala BNPB No.13.A/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia (berlaku 29 Februari - 29 Mei 2020).
<b>MARET 2020</b>		

<p>2 Maret 2020</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus positif virus Corona pertama kali yang terjadi di Indonesia diumumkan oleh Pemerintah.</li> <li>• Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani membantah bahwa Pemerintah Indonesia sengaja menyembunyikan kasus penularan virus Corona yang sebelumnya telah dicurigai oleh PM Australia.</li> <li>• Menteri Terawan membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa sekitar 100 orang di DKI Jakarta dalam pengawasan dan pemantauan karena wabah virus Corona. Menurut Menkes semua pemeriksaan terhadap pasien yang diduga terinfeksi menunjukkan hasil negatif.</li> </ul>
<p>3 Maret 2020</p>	<p>KPA, AMAN, WALHI dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menolak hadir pada rapat bersama KSP mengenai Omnibus Law Cipker.</p>	<p>Pemerintah Kota Depok awalnya tidak ingin memberikan informasi mengenai dua warganya yang positif virus Corona karena permintaan staf ahli Kementerian Kesehatan</p>
<p>4 Maret 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan demo di depan DPR terkait penolakan Omnibus Law.</li> <li>• Ketua Umum KASBI Nining Elitos mengatakan bahwa serikat buruh dan pekerja akan mendorong mogok nasional untuk menolak Omnibus Law</li> </ul>	
<p>5 Maret 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden mengumpulkan partai koalisi untuk membahas perkembangan Omnibus Law</li> <li>• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diutus Jokowi menemui SBY untuk meminta masukan terkait Omnibus Law</li> <li>• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah sedang menyusun 36 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan tujuh Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang akan menjadi peraturan pelaksana dari Omnibus Law Cipta Kerja.</li> </ul>	
<p>6 Maret 2020</p>		<p>Pemerintah terbitkan Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol</p>

		Area Pendidikan, dan Protokol Area Publik dan Transportasi. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan.
9 Maret 2020		Menteri Terawan dituding menutup-nutupi informasi mengenai kasus virus Corona. Ia dianggap menganggap remeh dan mengabaikan dua institusi yang telah menyarankan untuk memberikan masukan kepada Presiden mengenai wabah ini, namun saran itu diabaikan.
10 Maret 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkominfo Johnny G. Plate mengingatkan bahwa dalam rangka komunikasi publik, pemerintah daerah mengikuti protokol Pemerintah Pusat supaya satu saja narasi Pemerintah. Hal itu dikatakan karena sebelumnya Pemprov DKI Jakarta membuat situs web yang menyajikan terkait perkembangan virus Corona di ibukota.</li> <li>• 132 RS rujukan pemerintah untuk menangani Covid-19 yang tertuang dalam SK Menteri Kesehatan No.169/2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.</li> </ul>
11 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejumlah massa organisasi buruh melakukan demo di depan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta terkait penolakan RUU Omnibus Law</li> <li>• Aliansi Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi penolakan terkait Omnibus Law di depan kantor Gubernur Makassar.</li> <li>• Aksi buruh tolak Omnibus Law yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Mereka melakukan demo di depan kantor DPRD Sumatera Selatan.</li> </ul>	
12 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu dengan pimpinan partai politik dan inginkan pembahasan Omnibus Law mengerucut pada saat persidangan di DPR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE Menkes No.199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) sebagai penyempurnaan dan pengukuhan terhadap 5 protokol yang sempat diterbitkan oleh pemerintah</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demo buruh dan mahasiswa digelar di Cimahi terkait penolakan Omnibus Law</li> </ul>	<p>sebelumnya (6/3) agar gabungan protokol tersebut lebih komprehensif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulus Ekonomi Jilid II: Pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dan menanggukkan PPh Pasal 22 dan 25 guna mendorong ekonomi di tengah wabah Covid-19. Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kemenkeu ada 4 alternatif dan rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Relaksasi restitusi PPN dipercepat selama 3 bulan;</i></li> <li>- <i>Relaksasi PPh Pasal 22 Impor selama 3 bulan;</i></li> <li>- <i>Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 25%-50%;</i></li> <li>- <i>Relaksasi PPh Pasal 21.</i></li> </ul> </li> </ul>
13 Maret 2020	Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi tolak Omnibus Law di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya dengan diwarnai kericuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keppres No.7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keputusan tersebut menunjuk Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan sejumlah menteri sebagai pengarah dalam tim. Gugus Tugas berada dan bertanggung jawab kepada Presiden.</li> <li>• Presiden menyatakan bahwa tidak perlu lagi membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani virus Corona yang sejak awal sudah ada dan telah dikomandani oleh dirinya sendiri.</li> </ul>
15 Maret 2020	Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Surabaya melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi pada tanggal 18 Maret 2020 di depan kantor DPRD dan Gubernur Jawa Timur terkait penolakan Omnibus Law	<p>Sejumlah arahan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah (Pemda):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda dapat mengeluarkan banyak kebijakan demi mencegah penyebaran virus Corona.</li> <li>- Berkoordinasi untuk memonitor status daerahnya</li> <li>- Mengalokasi anggaran untuk penanganan virus Corona.</li> </ul>
16 Maret 2020	Aliansi Buruh se-Jawa Barat melakukan demo menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Kota Bandung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien di Cianjur meninggal yang sebelumnya dinyatakan negatif virus Corona namun kemudian dinyatakan positif virus Corona oleh Pemerintah.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden melarang Pemerintah Daerah menerapkan <i>lockdown</i> dan mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya dapat diambil oleh Pemerintah Pusat.</li> </ul>
17 Maret 2020		Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Kesehatan karena dinilai tidak becus untuk mengurus pandemi virus Corona.
18 Maret 2020	LBH Jakarta mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law dan fokus untuk melakukan penanganan virus Corona.	
19 Maret 2020		Penanganan virus Corona di daerah Jakarta yang menjadi salah satu epicenter virus Corona diserahkan kepada Anies Baswedan.
24 Maret 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah telah mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan oleh para tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19 ke sejumlah provinsi. Sebanyak 105.000 unit APD telah disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi.</li> <li>• Presiden memerintahkan Menteri Terawan untuk terlebih dahulu memprioritaskan <i>rapid test</i> Covid-19 bagi para dokter dan paramedis beserta keluarganya.</li> <li>• Presiden memberikan arahan terkait pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien Covid-19 kepada jajarannya untuk menyiapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah Covid-19 dalam APBN maupun APBD.</li> </ul>
27 Maret 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi (P2MS) Institut Teknologi Bandung (ITB) memprediksi penyebaran virus Corona akan berakhir di Indonesia pada akhir Mei hingga awal Juni 2020.</li> <li>• Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) mengatakan bila tidak ada intervensi yang serius dari Pemerintah maka</li> </ul>

		penyebaran virus Corona akan menjangkit 2,5 juta orang.
29 Maret 2020		Pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan bahwa tidak benar/hoaks mengenai informasi pengenaan sanksi bila daerah tetapkan <i>lockdown</i>
30 Maret 2020	Ketua DPR Puan Maharani pastikan pembahasan Omnibus Law akan tetap berjalan sesuai mekanisme setelah membuka masa persidangan ke III 2019-2020.	Permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai permintaan karantina wilayah ditolak oleh Pemerintah Pusat.
31 Maret 2020	Said Iqbal (Ketua KSPI) menolak usulan Fraksi Partai Nasdem untuk mempercepat pembahasan Omnibus Law. Usulan tersebut menurutnya menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki empati terhadap rakyat kecil.	Pemerintah terbitkan aturan pelaksanaan PSBB dan diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat serta Perppu mengenai ekonomi untuk penanganan COVID-19.

